

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH  
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Karolina Ina Penaten  
*e-mail: lianbungalawan@gmail.com*

Lilik Sri Hariani  
Doni Wirshandono  
*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang)*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik regresi berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci:** *pajak daerah, retribusi daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal.*

***Abstract***

This study aims to determine the effect of local tax revenue, regional retribution and excess budget financing on the allocation of capital expenditure in districts and cities in the East Java province. The variables in this study are regional taxes, regional levies and excess budget financing as an independent variable and capital expenditure as the dependent variable. Analysis of the data in this study uses multiple regression statistical methods. Hypothesis test results show that local tax revenues and regional reductions do not have a significant effect on capital expenditure allocations while the remaining budget financing has a significant effect on capital expenditure allocations in the East Java province.

**Keywords:** *local tax revenue, regional retribution and excess budget financing, capital expenditure.*

**PENDAHULUAN**

Sistem pemerintahan di Indonesia dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang paling besar yang membawa perbaikan signifikan bagi sistem pemerintahan adalah beralihnya sistem sentralisasi yang memusatkan wewenang dari pemerintah pusat menjadi desentralisasi. Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan

Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU NO.32 Tahun 2004) dan UU NO. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU NO 33 Tahun 2004). Dalam UU NO. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun sektor nonkeuangan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun anggaran yang kemudian dijadikan aktivitasnya. Anggaran dalam pemerintah daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah( APBD). Seluruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar Dkk, 2008). Menurut UU NO 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah. Sedangkan fungsi dari APBD menurut UU NO 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah untuk otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Struktur APBD terdisi atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Belanja daerah yang meliputi biaya langsung dan tidak langsung (Permendagri NO 25 tahun 2009) merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. sebaliknya pengelolaan dana yang buruk akan menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan pemda adalah disaat dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreatifitas mengelola dana, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif seperti untuk melakukan aktifitas pembangunan dan juga untuk program-program pelayanan publik. Berdasarkan data realisasi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 diketahui bahwa perbandingan antara dana yang dialokasikan untuk belanja operasional jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yaitu belanja operasi sebesar 60,93% sedangkan belanja modal hanya mencapai 9,68% dimana menurut Permendagri No 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja langsung diupayakan mendapatkan porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, dan belanja mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur masih belum memenuhi tuntutan dari pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Belanja Modal*

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah namun menimbulkan konsekuensi menambah biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. (Halim 2007:107) juga mengutarakan hal yang senada bahwa modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas

dan kualitas aset.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan dan kelompok belanja administrasi umum.

### ***Pajak Daerah***

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok: 1) pajak provinsi, 2) pajak kota/kabupaten.

### ***Retribusi Daerah***

Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelaksanaan pungutan retribusi daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerinath Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi Menjadi tiga jenis yaitu: Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

### ***Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)***

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lai-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisisensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi karena SiLPA hanta akan terbentuk bila terjadi surplus APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen pemerintah lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT:2008).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*. Penelitian *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Effendi dan Tukiran 2012:4). Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Noor (2012:38), pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal kabupaten/kota se- Jawa Timur. Dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui akses website <http://www.djpk.depkeu.go.id> yang kemudian akan diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur sebanyak 38 Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten se-Jawa Timur yang melaporkan laporan APBD-nya Tahun anggaran 2016. Sedangkan sample pada penelitian ini menggunakan teknik sensus. Dalam penelitian ini memiliki 4 (empat) variabel yaitu 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan SiLPA sedangkan variabel dependen adalah Belanja Modal.

## **Teknik Analisis Data**

### **Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

#### **Uji Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2011:110) uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Kriterianya, menurut Firdaus (2010:101), jika nilai Durbin Watson = 1,55 – 2,46 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

#### **c. Uji Multikolinieritas**

Menurut Santoso (2010:206) uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas atau multikol. Model regresi yang baik, variabel-variabel independen tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dimana jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas, sedangkan jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinieritas.

#### **d. Uji Heterokedastisitas**

Menurut Santoso (2010:207) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dengan kriteria pengujian: H0 diterima jika tidak ada pola yang jelas, secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

## **Analisis Regresi Berganda**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (Multiple Linier Regression) yang menghubungkan variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y) yang bertujuan untuk mengeksktahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah dan SiLPA terhadap Belanja Modal. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Sosial Science). Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

### **Uji Hipotesis**

#### **a. Uji Pengaruh Simultan (F-Test)**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Selain itu dengan menghitung besarnya koefisien R square ( $r^2$ ) dengan rumus  $KD=r^2 \times 100\%$  (Sunnyoto, 2012:211).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Bila nilai signifikan  $f < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, yang berisi koefisien jalur signifikan artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Bila nilai signifikan  $f > 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak, yang berarti koefisien jalur tidak signifikan. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **b. Uji Parsial (T-Test)**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan signifikansi level sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Dengan taraf keyakinan tertentu maka akan dapat ditentukan nilai signifikan yaitu  $t$

$< 0,05$  atau 5% maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sedangkan jika nilai signifikan  $t > 0,05$  atau 5% maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (Sunnyoto, 2012:212). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Bila nilai signifikan  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Bila nilai signifikan  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah jika data normal atau mendekati normal. Jika data menyebar searah dengan garis diagonal maka dapat memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam pengujian ini, setelah dilakukannya pengujian ternyata memperlihatkan distribusi tidak normal, maka tidak bisa dilanjutkan ke penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode transformasi data untuk menormalkan data penelitian. Menurut Ghazali (2013:34) " data yang tidak terdistribusi secara tidak normal dapat ditransformasikan agar menjadi normal". Transformasi data adalah proses konversi data ke skala baru agar memenuhi homogenitas ragam dan sebaran data menjadi normal, tujuannya ialah untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, hal ini berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam penelitian.

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali 2006:96).

### Hasil Uji Asumsi Autokorelasi

Durbin Watson	Keterangan
1,576	Tidak terjadi autokorelasi

Dari tabel di atas didapat nilai Durbin Watson 1,576 yang berada di antara 1,55 – 2,46, hal ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas diuji dengan *VIF* (*Volume Inflation Factor*). Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam satu model. Masalah multikolinieritas muncul apabila terjadi hubungan atau berpengaruh yang sangat kuat antara dua variabel atau lebih. Apabila *VIF* pada variabel bebas < 10, artinya terjadi multikolinieritas dan demikian sebaliknya, apabila variabel > 10 artinya terjadi multikolinieritas. Data hasil analisis yang dilakukan, didapatlah hasil sebagai berikut:

### Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerimaan Pajak Daerah (X1)	0,347	2,88	Tidak terjadi multikolinieritas
Retribusi Daerah (X2)	0,347	2,883	Tidak terjadi multikolinieritas
SILPA (X3)	0,826	1,211	Tidak terjadi multikolinieritas

Variabel x1, x2, dan x3 masing – masing memiliki nilai *tolerance* kurang dari 1, demikian juga angka *VIF* masih diantara angka 1-10, artinya tidak terjadi multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah alat untuk menguji apakah dalam suatu analisis berganda mempunyai ketidaksamaan varian dalam suatu pengamatan. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi artinya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik hasil analisis. Jika ada pola seperti titik – titik yang membentuk gelombang menyebar kemudian, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji tersebut, terlihat titik – titik menyebar acak tanpa membentuk suatu pola yang jelas. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan.

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X1, X2 dan X3 terhadap Y. Hasil analisis terlihat dalam tabel berikut :

#### Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Bebas	B	Beta	T	Sig T.	Keterangan
Penerimaan Pajak Daerah (X1)	0,159	0,304	1,536	0,134	Signifikan
Retribusi Daerah (X2)	0,164	0,225	1,137	0,263	Signifikan
SiLPA (X3)	0,249	0,364	2,84	0,008	Signifikan
Variabel Terikat: Y					
Konstanta	= 6,571				
R	= 0,734				
R Square	= 0,538				
Adjusted R Square	= 0,497				
F	= 13,206				
Sig F	= 0,000				

Dari tabel di atas maka persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$

$$Y = 6,571 + 0,159 X_1 + 0,164 X_2 + 0,249 X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 6,571 memiliki arti jika variabel X1, X2 dan X3 sama dengan 0 (nol), maka Y sebesar 6,571.
- Koefisiensi regresi X1 sebesar 0,159, artinya kenaikan X1 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat sebesar 0,159 dan sebaliknya.
- Koefisiensi regresi X2 sebesar 0,164, artinya kenaikan X2 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat sebesar 0,164 dan sebaliknya.
- Koefisiensi regresi X3 sebesar 0,249, artinya kenaikan X3 sebanyak 1 satuan akan menyebabkan Y meningkat sebesar 0,249 dan sebaliknya.

### Uji Hipotesis

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R<sup>2</sup> yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengujian di atas, didapat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,497. Artinya 49,7 % variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2 dan X3, sedangkan sisanya sebesar 50,3 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

### Uji pengaruh simultan (F-Test)

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Rekapitulasi hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Rekapitulasi Hasil Analisis Uji F

Variabel Bebas	F	Sig. F	Keterangan
X1, X2, X3	13,206	0,000	Signifikan

Dari tabel di atas terlihat nilai F hitung sebesar 13,206 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, berarti signifikansi F kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y.

### Uji Parsial (T-test)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Hasil uji t terlihat pada tabel :

#### Rekapitulasi Hasil Analisis Uji t

Variabel Bebas	T	Sig. T	Keterangan
Penerimaan Pajak Daerah (X1)	1,536	0,134	Signifikan
Retribusi Daerah (X2)	1,137	0,263	Signifikan
SiLPA (X3)	2,84	0,008	Signifikan

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Dari hasil analisis uji t pada tabel di atas terlihat bahwa:

1. Variabel X1 menunjukkan nilai signifikansi t sebesar  $0,134 > 0,05$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X1 terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak.
2. Variabel X2 menunjukkan nilai signifikansi t sebesar  $0,263 > 0,05$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel X2 terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak.
3. Variabel X3 menunjukkan nilai signifikansi t sebesar  $0,008 < 0,05$ , berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel X3 terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

## KESIMPULAN

Pengujian secara simultan didapat bahwa variabel indepen yang diteliti penulis yang meliputi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Sisa Lebh Pembiayaan Anggaran bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal dibuktikan dengan pengujian statistik simultan (F-test) yang dilakukan penulis menunjukn nilai sig 0,000 atau lebih kecil dari nilai alpha (0,05).

Sementara itu untuk pengujian secara parsial yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial menunjukan nilai signifikan t sebesar  $0,034 > 0,05$  sehingga dapat



disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan kata lain, Penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

2. Pengujian secara parsial menunjukkan nilai signifikan t sebesar  $0,263 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan kata lain, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur
3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan t sebesar  $0,008 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan kata lain, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di provinsi Jawa Timur.

## SARAN

1. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan penerimaan pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing karena kedua hal tersebut sangat berperan penting dalam pengalokasian belanja modal yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk dana Sisa lebih pembiayaan anggaran diharapkan dapat dialokasikan secara tepat untuk pembangunan perekonomian maupun peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mengurangi pelampauan atau penumpukan dana yang besar yang dapat menimbulkan indikasi bahwa kurang baiknya pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambat variabel yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah seperti dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari pos pendapatan lain-lain yang sah, serta memperluas wilayah penelitian agar dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih representative dan dapat berkontribusi untuk pemerintah yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Sofian, dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Kawedar, Warsito, dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik (Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah/ Buku 1*. Semarang: Salemba Empat.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenad Group. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Santoso, S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

-----Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

-----Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

-----Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

-----Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-----Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.